

**ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN UPAH
TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PULAU SUMATERA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Padang*



Oleh :

Sonia Pratiwi

2015/15060065

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

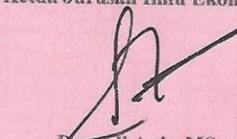
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN UPAH
TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PULAU SUMATERA

Nama : Sonia Pratiwi
NIM/TM : 15060065/2015
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan
Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Disetujui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Dr. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1001

Diketahui Oleh:
Pembimbing



Mike Triani, SE, MM
NIP. 19840129 200912 2002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

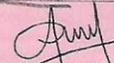
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN UPAH
TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PULAU SUMATERA**

Nama : Sonia Pratiwi
NIM/TM : 15060065/2015
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Melti Roza Adry, SE, ME	1. 
2	Anggota	: Drs. Ali Anis, MS	2. 
3	Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sonia Pratiwi
NIM / Tahun Masuk : 15060065 / 2015
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 31 Oktober 1997
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Cendana Mata Air Tahap 3 Blok K 2
No. HP / Telepon : 089681312860
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Upah terhadap Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2019

Yang menyatakan



Sonia Pratiwi
NIM. 15060065

ABSTRAK

Sonia Pratiwi (15060065) : Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Upah terhadap Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Ibu Mike Triani, SE, MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Pengaruh dari infrastruktur jalan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. (2) Pengaruh infrastruktur listrik terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. (3) Pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. (4) Pengaruh upah terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera dan upah terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. (5) Pengaruh infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, dan upah terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penanaman modal asing sebagai variabel terikat dan infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi dan upah sebagai variabel bebas. Penelitian ini menggunakan data panel dari semua provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2013 – 2017. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi panel dengan model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Infrastruktur Jalan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. (2) Infrastruktur listrik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. (3) Infrastruktur telekomunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera (4) Upah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera, sedangkan (5) Secara bersama-sama infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi dan upah berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Telekomunikasi, Upah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan berkah yang begitu banyak terhadap hamba-Nya, serta shalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat dan izin Allah sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Upah terhadap Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala – kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Ibu Mike Triani, SE, MM selaku pembimbing penulis yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, memberikan bimbingan, motivasi arahan, dan saran – saran yang sangat berharga kepada penulis selama penulisan skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Teristimewa kepada orang tua tercinta, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dalam setiap sujudnya juga dukungan kepada penulis baik moril maupun materil dan semangat yang selalu terbawa melalui perantara doa. Terima kasih papa dan mama atas segala pengorbanan dan perjuangan yang hingga bercucuran keringat dan air mata serta jasa yang tak terhingga dan tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Mike Triani, SE, MM selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan penuh sabar mendengar keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji skripsi yaitu Ibu Ariusni, SE, M.Si dan Bapak Drs. Ali Anis, MS.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Kepada sahabat September Ceria Squad yang selalu menyemangati, mendoakan, membantu dengan sepenuh hati, dan merangkul tanpa perlu diminta. Kalian luar biasa, beruntung bisa memiliki sahabat seperti kalian. I love you hehe.
10. Kepada Sindi Oktaviani, Della Marsel Feni, Safitri, dan Fajar Wahyu Putra terima kasih untuk dukungan yang luar biasanya selama penulisan skripsi ini. Tetap semangat dan segera menyusul special untuk Della Marsel Feni dan Safitri.
11. Kepada keluarga Ilmu Ekonomi 2015 yang telah sama – sama berjuang sejak awal hingga sekarang, terima kasih untuk sebuah cerita klasik yang sangat

indah dan sulit untuk dilupakannya, terima kasih untuk bantuan, dan partisipasinya dalam penulisan skripsi Sonia selama ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua Amin.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS... 17	
A. Kajian Teori	17
1. Penanaman Modal Asing	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing	23
2. Infrastruktur	25
3. Konsep Hubungan Infrastruktur dengan Penanaman Modal Asing.....	28
3. Upah.....	29
4. Konsep Hubungan Upah dengan Penanaman Modal Asing	31
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Konseptual.....	33
D. Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	37
C. Jenis Data dan Sumber Data	37
D. Variabel Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Defenisi Operasional.....	39
G. Teknik Analisis Data	40

1. Analisis Deskriptif	40
2. Analisis Induktif	41
H. Pengujian Hipotesis	49
1. Uji t-statistik	49
2. Uji F-statistik	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Penelitian	51
B. Deskripsi Variabel Penelitian	52
1. Deskripsi Perkembangan Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera	52
2. Deskripsi Perkembangan Infrastruktur Jalan di Pulau Sumatera	55
3. Deskripsi Perkembangan Infrastruktur Listrik di Pulau Sumatera	57
4. Deskripsi Perkembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Pulau Sumatera	59
5. Deskripsi Perkembangan Upah di Pulau Sumatera	61
C. Analisis Induktif	63
1. Model Estimasi Regresi Panel	63
2. Pemilihan Model	66
3. Analisis Regresi Panel	68
4. Koefisien Determinasi	71
5. Pengujian Hipotesis	71
D. Pembahasan Hasil Penelitian	74
1. Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera	74
2. Pengaruh Infrastruktur Listrik Terhadap Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera	76
3. Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera	78
4. Pengaruh Upah Terhadap Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera	80
5. Pengaruh Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Telekomunikasi dan Upah Terhadap Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera	81

BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 83
A. SIMPULAN..... 83
B. SARAN..... 84
DAFTAR PUSTAKA..... 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penanaman Modal Asing, Perkembangan Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Telekomunikasi dan Upah Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 – 2017.....	8
Tabel 3.1	Klarifikasi Nilai d (D-W).....	46
Tabel 4.1	Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera dari tahun 2013 – 2017.....	52
Tabel 4.2	Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2013 – 2017.....	54
Tabel 4.3	Perkembangan Infrastruktur Jalan Menurut Provinsi dan Kondisi Baik di Pulau Sumatera tahun 2013 – 2017.....	58
Tabel 4.4	Perkembangan Infrastruktur Listrik Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2013 – 2017.....	59
Tabel 4.4	Perkembangan Infrastruktur Telekomunikasi Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2013 – 2017.....	61
Tabel 4.6	Perkembangan Upah Minimum Provinsi Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2013 – 2017.....	63
Tabel 4.7	Hasil Estimasi Common Effect Model (CEM).....	65
Tabel 4.8	Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM).....	66
Tabel 4.9	Hasil Estimasi Random Effect Model.....	67
Tabel 4.10	Hasil Estimasi Uji Chow.....	68
Tabel 4.11	Hasil Estimasi Uji Hausman.....	69
Tabel 4.12	Hasil Estimasi Analisis Regresi Panel.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Realisasi Penanaman Modal Asing Menurut Pulau di Indonesia.....	3
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual Pengaruh Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penanaman Modal Asing.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi adalah suatu aliran yang dapat meningkatkan persediaan modal. Investasi memegang peran penting untuk suatu negara sebagai salah satu penyokong utama dalam mendukung terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada peningkatan produksi dan bersumberkan pada penambahan investasi. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan terjadinya pembangunan ekonomi disuatu wilayah. Maka dengan begitu pembentukan modal atau investasi yang besar perlu dilakukan di negara berkembang agar negara tersebut dapat terlepas dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Di negara berkembang permasalahan yang kerap terjadi adalah kurangnya persediaan modal untuk mendukung proses produksi. Terbatasnya alat – alat dan modal dalam perekonomian dapat dilihat dari jumlah alat modern yang digunakan dalam kegiatan produksi. Hal tersebut berdampak pada produktivitas dan organisasi produk yang kurang efisien dan selanjutnya akan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat di negara berkembang akan rendah. Lebih lanjut permasalahan kekurangan pembentukan modal disebabkan oleh ketidakmampuan dana modal dan tabungan dari masyarakat

untuk proses investasi. Itu semua mendorong adanya pembentukan modal yang berasal dari asing yang mampu menyediakan modal dengan cukup besar.

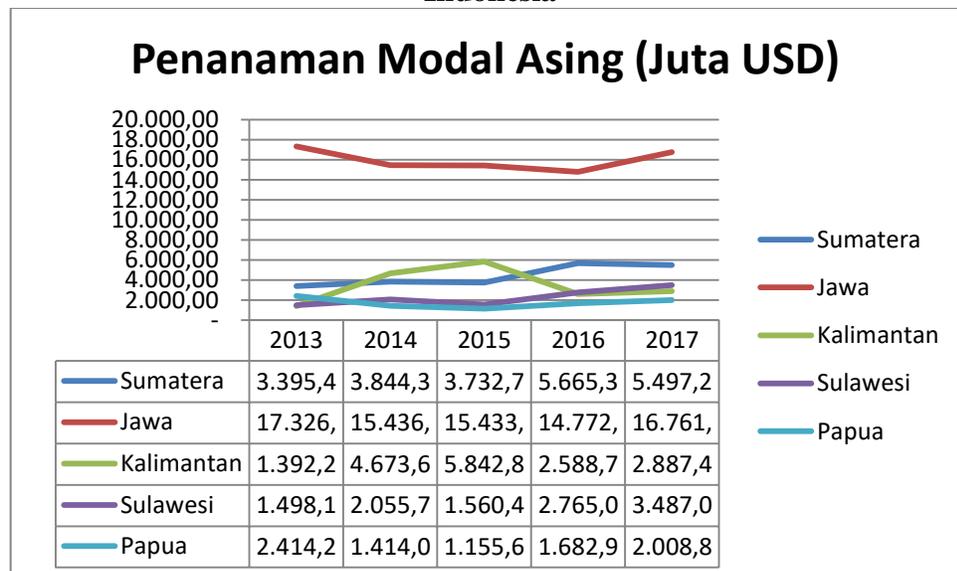
Penanaman modal asing adalah kegiatan investasi lintas negara. Penanaman modal asing dilakukan oleh penduduk atau perusahaan asing. Penanaman modal asing selalu berupa kontrol penuh atau parsial melalui modal dan manajemen (Mudrajad, 2010). Menurut Jhingan (2010) penggunaan modal asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal uang dan modal fisik, modal asing juga membawa keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik – teknik produksi maju, pembaharuan produk, dan lain – lain. Hal tersebut akan membantu mempercepat pembangunan negara – negara terbelakang.

Penanaman modal dari asing dapat masuk ke dalam suatu wilayah apabila para investor merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan investasi. Kegiatan investasi pada suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh potensi ekonomi dan iklim usaha yang dimiliki pada suatu wilayah tersebut. Iklim usaha merupakan suatu kondisi yang dapat merangsang terjadinya investasi. Oleh sebab itu iklim usaha sangat berpengaruh ada kesinambungan investasi. Iklim investasi dapat dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berkait satu sama lain dalam membangun suasana yang menyenangkan bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan investasi.

Dengan adanya otonomi daerah dapat membuat pemerintah daerah untuk lebih mandiri didalam mengatur dan membangun daerahnya. Begitupun yang terjadi pada pemerintahan provinsi – provinsi di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki 10 Provinsi dengan potensi ekonomi yang mendukung sehingga menjadikan Pulau Sumatera sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Jawa (Brodjonegoro, 2018).

Perkembangan perekonomian yang cukup pesat di Pulau Sumatera menjadi pendorong tumbuhnya penanaman modal khususnya dari asing. Pulau Sumatera menjadi tempat menyerap penanaman modal asing tertinggi kedua dibandingkan dengan Pulau yang lain di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penanaman modal asing menurut pulau di Indonesia.

Gambar 1.1 Realisasi Penanaman Modal Asing Menurut Pulau di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2018)

Berdasarkan pada Gambar 1.1 memperlihatkan tren penanaman modal asing dari tahun 2013 hingga tahun 2017 menurut lima pulau terbesar di Indonesia. Pulau Papua merupakan wilayah di Indonesia dengan tingkat penanaman modal asing terendah. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi perlambatan penanaman modal asing di Papua. Rendahnya penanaman modal asing yang terjadi di Papua disebabkan karena iklim investasi yang kurang kondusif. Di Papua sering terjadi kerusuhan antar suku yang membuat kurangnya keamanan investasi di Papua dan ini mempengaruhi persepsi investor yang akan menanamkan modalnya di Papua (Okezone, 2016).

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat penanaman modal asing tertinggi di Indonesia. Dari Gambar 1.1 dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terlihat bahwa di Pulau Jawa terjadi fluktuasi penanaman modal asing. Penanaman modal asing di Pulau Jawa begitu pesat dibandingkan dengan lokasi di luar Pulau Jawa. Penanaman modal asing sebagian besar masih mengambil lokasi di Pulau Jawa. Hanya sebagian kecil yang mengambil lokasi di luar Pulau Jawa dengan alasan bahwa ketersediaan energi di luar Pulau Jawa belum bisa diandalkan dibandingkan dengan di Pulau Jawa (Okezone, 2016).

Di Indonesia, Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan penanaman modal asing tertinggi kedua setelah Pulau Jawa. Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan penanaman modal asing di Pulau Sumatera mengalami

fluktuasi setiap tahunnya. Menurut Franky Sibarani (2015) Pulau Jawa masih menjadi target investasi asing terbesar dibandingkan Pulau Sumatera hal ini dikarenakan infrastruktur yang memadai dan tenaga kerja yang terampil menjadi magnet bagi para investor asing dan investor dalam negeri. Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang baik seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menerbitkan peraturan pemerintah tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang – bidang usaha tertentu untuk meningkatkan minat investasi asing di Pulau Sumatera.

Penelitian ini akan difokuskan pada Pulau Sumatera, karena Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan tingkat penanaman modal asing yang lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia setelah Pulau Jawa. Tingkat ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dan menentukan bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur mempunyai pengaruh terhadap investasi yang akan masuk di suatu wilayah (Todaro, 2011).

Infrastruktur dibagi menjadi infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi. Infrastruktur sosial terdiri dari kesehatan dan pendidikan. Sedangkan infrastruktur ekonomi dapat berupa jalan, air bersih, listrik, dan lainnya. Infrastruktur ekonomi, seperti infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik dapat menjadi modal yang digunakan oleh pemerintah dalam

meningkatkan investasi asing didaerahnya. Perkembangan infrastruktur yang baik akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya sehingga akan membuka akses yang besar dalam penerimaan sumber pendanaan daerah yang digunakan untuk pembangunan ekonomi suatu daerah.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam menunjang penanaman modal asing pada suatu daerah. Ketersediaan infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi seperti infrastruktur jalan merupakan faktor untuk menentukan daya tarik masuk investasi asing dan memiliki pengaruh dalam meningkatkan iklim investasi pada suatu daerah (Khadroo, 2008). Infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian yang menghubungkan kegiatan ekonomi antar wilayah sehingga distribusi barang dan jasa dapat bergerak dengan lancar.

Infrastruktur listrik juga merupakan salah satu faktor penting dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya pada suatu daerah. Infrastruktur listrik digunakan untuk memperlancar industrialisasi pada suatu daerah. Fasilitas produksi memerlukan energi listrik untuk dapat mengoperasikan mesin – mesinnya agar dapat melakukan kegiatan produksi. Dengan adanya infrastruktur listrik yang memadai dan berkualitas maka keberlanjutan kegiatan perekonomian dapat dilakukan (Urata dan Kawai, 2000).

Selain itu infrastruktur telekomunikasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya. Peranan telekomunikasi dalam menarik minat investor asing adalah sebagai suatu fasilitas yang dapat disediakan oleh negara dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antara investor asing dan negara tujuan sehingga para investor dapat lebih meminimalisir biaya dan menghemat waktu. Perkembangan dan kemajuan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat berdampak pada diterapkannya cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Penggunaan media telekomunikasi yang efisien akan memberikan dampak positif dalam peningkatan output perekonomian. Dengan meningkatnya output perekonomian, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan semakin meningkat.

Selain infrastruktur ekonomi, hal berikutnya yang dapat membantu terciptanya penanaman modal asing secara baik di suatu wilayah adalah upah. Menurut Mankiw (2006), tingkat upah yang rendah akan menarik investor menanamkan modalnya lebih besar dan sebaliknya tingkat upah yang tinggi membuat investor enggan menanamkan modalnya dikarenakan beban produksi yang meningkat. Bagi investor, upah merupakan beban atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan dalam melakukan proses produksi. Apabila suatu negara memiliki tingkat upah yang rendah maka akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya.

Tabel 1.1 Realisasi Penanaman Modal, Perkembangan Infrastruktur Jalan, Perkembangan Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Telekomunikasi dan Upah Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 – 2017

Provinsi	PMA (Juta USD)			Infra. Jalan (KM)			Infra. Listrik (GWH)			Infra. Telekomunikasi (Rupiah)			Upah (Juta Rupiah)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Aceh	21,2	134,5	23,2	1,47	10,52	4,58	7,81	9,95	3,40	111.682	113.264	107.359	1,90	2,12	2,50
Sumatera Utara	1.246,1	1.014,7	1.514,9	7,71	-5,75	4,83	5,23	6,17	4,67	107.714	111.247	111.235	1,63	1,81	1,96
Sumatera Barat	57,1	79,3	194,4	1,13	2,36	6,58	1,93	2,85	8,40	117.877	121.423	136.588	1,62	1,80	1,95
Riau	653,4	869,1	1.061,1	1,79	8,89	1,10	7,43	8,87	4,23	133.913	145.337	147.921	1,88	2,10	2,27
Jambi	107,7	61,0	76,8	34,12	11,38	-0,83	4,47	5,44	2,92	104.564	116.500	121.877	1,71	1,91	2,06
Sumatera Selatan	645,8	2.793,5	1.182,9	-13,90	40,49	5,84	6,82	3,25	6,09	96.587	111.451	105.485	1,97	2,21	2,39
Bengkulu	20,6	55,7	138,7	5,94	18,43	6,60	7,65	5,02	3,39	96.715	104.334	112.793	1,50	1,61	1,74
Lampung	257,7	85,7	120,6	3,72	-16,18	3,62	5,26	6,98	4,66	89.739	93.474	95.661	1,58	1,76	1,91
Kepulauan Bangka Belitung	82,7	52,7	153,1	-11,50	18,55	13,63	6,96	6,78	6,44	124.009	138.110	161.798	2,10	2,34	2,54
Kepulauan Riau	640,4	519,1	1.031,5	-11,40	12,80	1,64	2,91	12,60	6,96	196.291	200.570	222.844	1,95	2,18	2,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2019)

Pada Tabel 1.1 menggambarkan perkembangan realisasi penanaman modal, infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, dan upah minimum provinsi di Pulau Sumatera sepanjang tahun 2015 – tahun 2017. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa panjang jalan disetiap provinsi di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2017.

Menurut Khadaroo dan Seetanah (2008), ketersediaan infrastruktur khususnya infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi seperti infrastruktur jalan merupakan faktor untuk menentukan daya tarik masuk investasi asing dan memiliki pengaruh dalam meningkatkan iklim investasi pada suatu daerah. Infrastruktur jalan di Pulau Sumatera menunjukkan adanya peningkatan pembangunan setiap tahunnya meskipun pertumbuhan panjang jalan mengalami pertumbuhan yang tidak begitu pesat dibanding tahun sebelumnya. Adanya jalan membuat akses perekonomian menjadi mudah salah satunya distribusi logistik antar daerah, mobilitas, dan kegiatan ekonomi lainnya menjadi lebih cepat dan perekonomian meningkat sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Pada tabel 1.1 Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 mengalami peningkatan panjang jalan tertinggi yaitu sepanjang 40,49%, dengan semakin mudahnya akses darat di Sumatera Selatan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya lebih besar pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.793,51 juta USD. Namun di Provinsi Lampung pada tahun 2016 panjang

jalan mengalami penurunan pertumbuhan sepanjang 16,18% hal ini disebabkan kualitas jalan yang menurun sehingga membuat kerusakan pada jaringan jalan. Infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan tersebut membuat proses pengiriman bahan baku untuk produksi dan pendistribusian barang dan jasa menjadi melambat, sehingga terjadi penambahan biaya yang harus ditanggung oleh investor. Hal ini membuat kurangnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Lampung tahun 2016, terbukti terjadinya perlambatan investasi di Provinsi Lampung dibanding tahun sebelumnya yaitu investasi hanya sebesar 85,71 juta USD.

Hal yang berbeda terjadi di beberapa provinsi seperti, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 terjadi penurunan pertumbuhan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 11,40% namun investor ternyata tertarik untuk menanamkan modalnya dimana diketahui pada Tabel 1.1 penanaman modal asing tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 640,42 juta USD. Begitu juga pada Provinsi Jambi pada tahun 2016 terjadi peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 11,38%, namun investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya dimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 penanaman modal asing yang diterima Provinsi Jambi tahun 2016 mengalami perlambatan dari tahun 2015 yaitu sebesar 61,02 juta USD. Hal ini juga terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wheeler dan Mody (1992), kualitas infrastruktur energi merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan untuk menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya karena para investor asing akan lebih memilih negara dengan kualitas infrastruktur yang baik untuk menanamkan dananya. Infrastruktur listrik sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur jalan karena listrik sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan perekonomian dan industrialisasi pada suatu daerah.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat Provinsi Aceh mengalami peningkatan perkembangan infrastruktur listrik pada tahun 2016 yaitu sebesar 9,95%, peningkatan pada infrastruktur listrik membantu memperlancarkan kegiatan ekonomi sehingga penanaman modal asing juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 dibandingkan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 134,51 juta USD dan pada tahun 2017 Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan infrastruktur listrik sebesar 8,40% diikuti dengan peningkatan penanaman modal asing pada tahun 2017 sebesar 194,4 juta USD. Hal yang berbeda terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 dimana terjadi perlambatan peningkatan infrastruktur listrik sebesar 3,25% sedangkan pada tahun tersebut terjadi peningkatan investasi yang sangat tajam dibanding tahun 2015 yaitu menjadi sebesar 2.793,51 juta USD.

Peningkatan kualitas dan kuantitas dari infrastruktur listrik tidak selamanya dapat meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan

modalnya di suatu daerah. Seperti pada Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 dimana peningkatan infrastruktur listrik yang signifikan sebesar 12,60%, namun peningkatan infrastruktur listrik ini membuat penanaman modal asing di Provinsi Kepulauan Riau menurun dimana pada tahun 2016 penanaman modal asing hanya mencapai 519,08 juta USD.

Infrastruktur telekomunikasi juga sama pentingnya dengan infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik. Dengan keberadaan infrastruktur telekomunikasi sangat memberikan dampak pada diterapkannya cara – cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa (Statistik Telekomunikasi Indonesia, 2013). Selain itu keberadaan infrastruktur telekomunikasi juga dapat mempermudah akses dalam komunikasi antara negara asal dan negara host tanpa harus mengunjungi negara tersebut dan dapat menghemat biaya serta waktu yang akan ditanggung oleh pihak investor, sehingga ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dengan baik dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan infrastruktur telekomunikasi dari tahun 2015 hingga 2017 yang diukur dengan rata – rata konsumsi untuk telekomunikasi mengalami fluktuasi. Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi dengan tingkat konsumsi untuk telekomunikasi tertinggi di Pulau Sumatera. Menurut Badan Pusat Statistik (2017) menyatakan bahwa tingginya penggunaan pada telekomunikasi mencerminkan iklim keterbukaan

informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Konsumsi untuk telekomunikasi tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 yaitu sebesar 222.844 Rupiah, tingginya tingkat konsumsi untuk telekomunikasi ini menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya terbukti dengan meningkatnya penanaman modal asing di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 menjadi sebesar 1.031,5 Juta USD.

Provinsi Lampung merupakan wilayah di Pulau Sumatera dengan konsumsi untuk telekomunikasi yang terendah pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Konsumsi untuk telekomunikasi terendah pada Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 89.739 Rupiah. Rendahnya tingkat konsumsi untuk telekomunikasi ini justru tidak mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Penanaman modal asing di Provinsi Lampung pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 257,7 juta USD.

Selain ketersediaan infrastruktur yang baik, investor asing juga melihat dari upah karena bagi investor upah merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan saat investor menanamkan modalnya pada suatu daerah. Pada Tabel 1.1 upah di setiap provinsi Pulau Sumatera mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2013 – 2017. Pada tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara terjadi peningkatan sebesar 1,81 juta rupiah. Peningkatan upah pada tahun 2016

ini menyebabkan kurang minat investor asing di Provinsi Sumatera Selatan dari pada tahun 2016 menjadi sebesar 1.014,65 juta USD.

Hal yang berbeda terjadi pada tahun 2016 di Provinsi Sumatera Selatan dimana peningkatan upah sebesar 2,21 juta rupiah dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya sehingga meningkatkan penanaman modal asing menjadi sebesar 2.793,51 juta USD pada tahun 2016 di Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan terjadi karena peningkatan perekonomian yang disebabkan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan beberapa proyek menyambut event internasional Asian Games.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah terurai diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “ **Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Upah terhadap Penanaman Modal Asing di Pulau Sumatera**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengaruh infrastruktur jalan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera?
2. Sejauhmana pengaruh infrastruktur listrik terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera?

3. Sejauhmana pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera?
4. Sejauhmana pengaruh upah terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera?
5. Sejauhmana pengaruh infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, dan upah terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur listrik terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh upah terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.
5. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, dan upah terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal asing di wilayahnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai referensi dalam melakukan penelitian – penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Investasi

Menurut Todaro (2011) mendefinisikan investasi sebagai bagian dari pendapatan nasional yang secara khusus diperuntukkan memproduksi barang capital atau modal pada periode waktu tertentu. Investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan terutama menambah barang – barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Penanaman modal mengarah pada perubahan keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis. Investasi merupakan akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2004).

Sedangkan menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu:

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Terdapat beberapa teori dari pandangan ahli – ahli ekonomi mengenai investasi :

- a. Teori Neo Klasik

Teori ini menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai suatu penggerak utama bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata – rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung semakin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

- b. Teori Harrod-Domar

Teori ini mempertahankan pendapat dai para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang

bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada maa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar (Sukirno, 2002).

Selain itu menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang investasi, investasi merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan sumber modalnya, UUPM mengklasifikasikan penanaman modal atau investasi ke dalam dua bagian yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak – hak dan benda – benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dapat secara perorangan dan atau merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut ketentuan Undang – Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Penanaman Modal Dalam Negeri Langsung (*Domestic Direct Investment*) yaitu penanaman modal oleh pemiliknya sendiri.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri Tidak Langsung (*Domestic Indirect Investment*), yaitu melalui pembelian obligasi – obligasi, emisi – emisi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing merupakan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/ atau pemerintah asing. Penanaman modal asing sebagai komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Penanaman modal asing lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, serta membuka lapangan pekerjaan baru.

Jaminan kepastian hukum diberikan pemerintah Indonesia terhadap investor terutama investor asing dengan menerbitkan Undang – Undang pada tahun 1967, yaitu Undang – Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang – bidang dan sektor – sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri yang disebabkan ketiadaan modal, pengalaman, dan

teknologi. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung, menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1967 kemudian disempurnakan dengan Undang – Undang 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing yaitu dengan memberikan keloggaran perpajakan pada investor asing, antara lain kelonggara dalam bea materai modal, bea masuk, dan pajak penjualan, bea balik nama, pajak perseroan, dan pajak dividen. Dilihat dari perkembangannya, Pemerintah Indonesia terus memperbaharui berbagai peraturan agar terciptanya iklim usaha yang kondusif serta penguatan daya saing perekonomian nasional serta mempercepat peningkatan penanaman modal yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penetapan undang – undang tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Penanaman Modal Asing dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) dalam arti seluruh modal yang dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 15 tahun sejak produksi komersila, sebagian saha asing harus dijual kepada warga negara dan atau badan hukum Indonesia melalui pasar modal.

- b. Penanaman Modal Asing Tidak Langsung (*Foreign Indirect Investment*) adalah usaha patungan antara modal asing dan modal yang dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia, dengan ketentuan peserta Indonesia harus memiliki paling sedikit 5% dari modal yang disetor sejak pendirian perusahaan penanaman modal asing. Ketentuan usaha patungan ini bersifat wajib bagi kegiatan investasi yang dilakukan dalam sembilan sektor publik yaitu pelabuhan, produksi, dan transisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pembangkit tenaga atom dan media masa.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing

Secara umum, keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara tujuan investasi dipengaruhi oleh kondisi negara tujuan investasi (*pull factors*) dan kondisi dan strategi dari negara investor asing (*push factors*). *Pull factors* yang mempengaruhi masuknya investasi asing antara lain adalah kondisi pasar negara tujuan investasi, ketersediaan sumber daya yang ada, daya saing, kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan pemerintah terkait penanaman modal asing, misalnya insentif atas investasi asing dalam bidang fiskal. Kondisi dan strategi dari negara investor asing (*push factors*) yang mempengaruhi masuknya investasi asing antara lain adalah strategi produksi dari perusahaan yang akan

melakukan investasi asing, serta persepsi resiko dari investor asing terhadap negara tujuan investasi (Robudi, 2011).

Selain itu menurut Nanga (2001) terdapat beberapa faktor – faktor yang menentukan jumlah investasi antara lain adalah tingkat suku bunga, terdapat hubungan negatif antara jumlah investasi dan tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga naik, level investasi akan berkurang, sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah orang akan berbondong – bonding menanamkan investasi diberbagai usaha. Inovasi dan teknologi, adanya temuan – temuan baru yang menyebabkan cara – cara berproduksi lama menjadi tidak efisien. Untuk itu perusahaan – perusahaan perlu menanamkan investasi untuk membeli mesin – mesin dan peralatan – peralatan baru yang lebih canggih. Tingkat perekonomian, makin banyak aktifitas perekonomian makin besar pendapatan nasional, dan makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung, yang pada akhirnya akan diinvestasikan pada usaha – usaha yang menguntungkan. Ramalan atau harapan orang tentang perekonomian dimasa datang, jika orang meramal perekonomian dimasa yang aka datang cerah, orang akan giat melakukan investasi sekarang. Tingkat keuntungan perusahaan, makin besar tingkat keuntungan perusahaan makin banyak laba yang dapat ditahan dan bagian laba yang ditahan ini dapat digunakan untuk tujuan investasi. Situasi politik, jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan – kemudahan bagi perusahaan maka tingkat

investasi akan tinggi dan sebaliknya jika pemerintah tidak banyak memberikan kemudahan bagi perusahaan banyak menghadap birokrasi yang berbelit – belit maka tingkat investasi akan rendah.

2. Infrastruktur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infrastruktur diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Secara umum sarana diketahui sebagai suatu fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan sebagainya. Menurut Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas – fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen – agen publik untuk fungsi – fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan – pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan – tujuan ekonomi dan sosial.

Tingkat ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dan menentukan bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur mempunyai pengaruh terhadap investasi yang akan masuk di suatu wilayah (Todaro, 2011). Infrastruktur merupakan input yang penting bagi kegiatan produksi karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan infrastruktur mempengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor – sektor lainnya. Jika suatu daerah mempunyai infrastruktur yang bagus, dapat

dipastikan bahwa daerah tersebut memiliki keadaan perekonomian yang bagus. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang relatif buruk maka keadaan perekonomiannya pun cenderung kurang bagus.

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama dari fungsi – fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari – hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat juga diartikan sebagai fasilitas – fasilitas atau struktur – struktur dasar, peralatan – peralatan, instalasi – instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya suatu sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Kodoatie, 2003).

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase), dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya).
- b) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi.
- c) Infrastruktur administrasi, meliputi penegakkan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi.

Infrastruktur dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi, dan saluran pembuangan, dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi, dan drainase, serta proyek transportasi seperti jalur kereta api, angkutan kota. Sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan (Familoni, 2004).

Infrastruktur dapat digolongkan dalam *Economic Overhead Capital* (EOC), yaitu barang – barang yang memberikan faedah umum seperti pelabuhan, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya. EOC ini bentuk dari *Social Overhead Capital* (SOC). Keuntungan bagi investasi – investasi ini (SOC) baru terasa bilamana timbul pertambahan permintaan dalam masyarakat. Bertambahnya permintaan efektif yang juga menaikkan pendapatan akan memberikan keuntungan pada investasi ini. Ini juga dapat disebut *public investment*. *Public investment* ini disebut sebagai investasi otonom atau *autonomus investment* yaitu investasi yang timbul bukan karena adanya tambahan pendapatan (Robudi, 2011).

3. Konsep Hubungan Infrastruktur dengan Penanaman Modal Asing

Menurut John Dunning terdapat hal yang akan mempengaruhi terjadinya penanaman modal asing di suatu daerah atau negara. Hal yang mempengaruhi tersebut salah satunya jaringan pemasaran yang baik. Jaringan pemasaran yang baik harus ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur yang baik (Robudi, 2011). Zheng (2009) mengkategorikan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari barang publik. Ketersediaan barang publik yang memadai menurunkan biaya perusahaan swasta bahkan jika ada peran langsung infrastruktur dalam kinerja produksi dan struktur biaya perusahaan swasta. Infrastruktur yang buruk akan dapat membatasi akses ke pasar lokal dan global yang pada akhirnya akan menghambat penanaman modal asing di negara berkembang. Singkatnya, mereka berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur mempromosikan FDI dan pengembalian investasi akan lebih besar kepada pemilik bisnis.

Menurut Khadaroo dan Seetanah (2008), ketersediaan infrastruktur khususnya infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi seperti infrastruktur jalan merupakan faktor untuk menentukan daya tarik masuk investasi asing dan memiliki pengaruh dalam meningkatkan iklim investasi pada suatu daerah. Sektor lain yang juga mempengaruhi kelancaran kegiatan perekonomian adalah energi, dalam hal ini infrastruktur listrik menjadi sangat penting dalam menunjang kegiatan – kegiatan perekonomian.

Wheeler dan Mody (1992), kualitas infrastruktur energi merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan untuk menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya karena para investor asing akan lebih memilih negara dengan kualitas infrastruktur yang baik untuk menanamkan dananya. Infrastruktur listrik sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur jalan karena listrik sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan perekonomian dan industrialisasi pada suatu daerah. Fasilitas produksi memerlukan pasokan listrik yang baik untuk dapat mengoperasikan mesin – mesinnya agar dapat melakukan kegiatan produksi. Dengan adanya infrastruktur listrik yang memadai dan berkualitas maka keberlanjutan kegiatan perekonomian dapat dilakukan (Urata dan Kawai, 2002).

3. Upah

Menurut Undang – Undang Tenaga Kerja No.13 tahun 2000, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Penetapan upah yang dilakukan oleh perusahaan harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak oleh para pekerja atau buruh agar kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara dapat diwujudkan.

Sedangkan menurut Sukirno (2002) upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Berikut jenis – jenis upah menurut Sukirno (2002) :

- a. Upah Nominal (upah uang) adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari pengusaha sebagai suatu pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
- b. Upah Riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang – barang dan jasa – jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Upah merupakan balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia (dalam arti luas termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dan sebagainya). Lebih lanjut dijelaskan, upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu upah nominal dan upah riil. Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja sebagai karyawan atau buruh (Gilarso, 2003).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada

dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang – undang yang mengikat tentang upah minimum provinsi. Produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha dan perbedaan jenis pekerjaan.

Di dalam pasar tenaga kerja dikenal konsep upah umum bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Selanjutnya mereka juga mengemukakan bahwa dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, kita perlu mengetahui upah riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja atau upah nominal dibagi oleh biaya hidup. Upah umum ini yang kemudian diadopsi menjadi minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang kebijakan. Standar upah buruh harus ada batasan minimumnya. Negara berkembang tidak boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin. Selanjutnya, perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum provinsi atas dasar kebutuhan hidup layak.

4. Konsep Hubungan Upah dengan Penanaman Modal Asing

Berdasarkan Mankiw (2006) semakin tinggi tingkat upah minimum semakin tinggi tingkat pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada investasi dan penyerapan tenaga kerja. Penetapan upah minimum secara langsung akan mempengaruhi tingkat investasi baik investasi asing maupun investasi dalam negeri.

Investasi asing akan meningkatkan permintaan tenaga kerja terampil yang akan mengarah pada peningkatan pangsa dari total upah perusahaan. Upah buruh yang rendah sebagai pendorong peningkatan investasi asing. Upah tenaga kerja yang rendah akan menurunkan biaya produksi yang relatif rendah, dengan demikian mengurangi beban biaya dan meningkatkan laba untuk perusahaan, sehingga mampu menarik investor untuk meningkatkan penanaman modalnya (Yogatama, 2011).

B. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1.	Joshua Ogunjimi dan Benjamine Amune (2017)	Impact of Infrastructure on FDI in Nigeria: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach.	Penanaman Modal Asing, Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Telekomunikasi, dan Infrastruktur Pertanian	Listrik memberikan dampak yang signifikan terhadap FDI pada jangka panjang. Namun pada jangka pendek tidak satupun variabel infrastruktur memberikan dampak terhadap FDI di Nigeria.
2.	A. J. Khadaroo dan B. Seetanah (2008)	Transport Infrastructure and Foreign Direct Investment	Infrastruktur transportasi dan Penanaman Modal Asing	Infrastruktur transportasi pada jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing.
3.	Hadi Setiawan (2014)	Analisis pengaruh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan	Penanaman Modal Asing, UMP Tenaga Kerja, dan	Upah minimum provinsi dan infrastruktur berpengaruh signifikan dan positif terhadap penanaman

		infrastruktur terhadap penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta.	Infrastruktur Jalan	modal asing di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta.
--	--	---	---------------------	--

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu konsep yang menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukkan persepsi keterkaitan antar variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah.

Penelitian ini mencoba mencari bagaimana pengaruh infrastruktur ekonomi dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. Berdasarkan Mankiw (2006) semakin tinggi tingkat upah minimum semakin tinggi tingkat pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada investasi dan penyerapan tenaga kerja. Penetapan upah minimum secara langsung akan mempengaruhi tingkat investasi baik investasi asing maupun investasi dalam negeri.

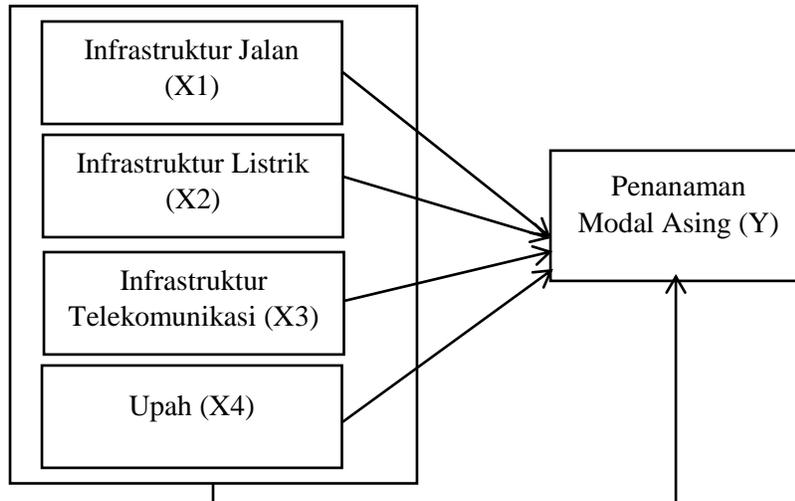
Todaro (2000) menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur di suatu negara merupakan faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat memperlancar penanaman modal atau investasi yang akan masuk pada suatu

negara atau suatu wilayah. Infrastruktur ekonomi dapat menjadi modal yang digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan investasi asing didaerahnya.

Ketersediaan infrastruktur ekonomi yang baik akan memudahkan akses perekonomian di suatu daerah. Perkembangan infrastruktur yang baik akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya sehingga akan membuka akses yang besar dalam penerimaan sumber pendanaan daerah yang digunakan untuk pembangunan ekonomi suatu daerah. Sebagai contoh, jika suatu daerah memiliki ketersediaan infrastruktur listrik yang cukup dapat memperlancar proses produksi. Kemudian infrastruktur jalan yang tersedia dalam kondisi memadai maka kegiatan bisnis usaha dapat berkembang seiring dengan ketersediaannya infrastruktur jalan yang baik, dan infrastruktur telekomunikasi untuk memperlancar komunikasi jarak jauh. Pada penelitian ini difokuskan pada penanaman modal asing, infrastruktur ekonomi, dan upah. Infrastruktur ekonomi ini terdiri dari infrastruktur jalan, infrastruktur listrik dan infrastruktur telekomunikasi.

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dijelaskan pada

gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kerangka konseptual diatas, untuk jawaban sementara dari permasalahan tersebut dan mengacu pada kajian teori dan kerangka konseptual, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Infrastruktur jalan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Infrastruktur listrik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Infrastruktur telekomunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Upah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, dan upah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. Artinya, apabila terjadi peningkatan atau penurunan pada infrastruktur jalan tidak mempengaruhi penanaman modal asing di Pulau Sumatera.
2. Infrastruktur listrik memiliki pengaruh terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. Artinya ketika terjadi peningkatan pada infrastruktur listrik akan meningkatkan penanaman modal asing di Pulau Sumatera. Begitupun sebaliknya, ketika terjadi penurunan pada variabel infrastruktur listrik akan menurunkan penanaman modal asing di Pulau Sumatera.
3. Infrastruktur telekomunikasi memiliki pengaruh terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. Artinya ketika terjadi peningkatan pada infrastruktur telekomunikasi akan meningkatkan penanaman modal asing di Pulau Sumatera. Begitupun sebaliknya, ketika terjadi penurunan pada variabel infrastruktur telekomunikasi akan menurunkan penanaman modal asing di Pulau Sumatera

4. Upah berpengaruh tidak signifikan terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera. Artinya, ketika terjadi peningkatan atau penurunan upah tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.
5. Secara bersama – sama infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, dan upah berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Pulau Sumatera.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas jalan baik , serta perlu adanya kebijakan seperti penambahan panjang jalan dengan kondisi baik, dan perbaikan kondisi jalan untuk memberikan akses yang mudah dan lalu lintas barang agar roda perekonomian terus meningkat. Dengan meningkatnya perekonomian mendorong penanaman modal asing di setiap provinsi di Pulau Sumatera.
2. Upah pekerja pada setiap provinsi di Pulau Sumatera yang tergolong rendah merupakan salah satu daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Pulau Sumatera. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan penanaman modal asing di Pulau Sumatera agar dapat menciptakan lapangan usaha yang semakin luas guna menyejahterakan masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk merubah atau menambah cakupan penelitian, seperti jumlah sampling dan variabel yang digunakan. Sehingga dapat melengkapi penelitian yang telah peneliti buat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Hanung Prakoso. 2017. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia pada tahun 2011 – 2015*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Statistik Indonesia 2013*: Jakarta.
 _____ .2014. *Statistik Indonesia 2014*: Jakarta.
 _____ .2015. *Statistik Indonesia 2015*: Jakarta.
 _____ .2016. *Statistik Indonesia 2016*: Jakarta.
 _____ .2017. *Statistik Indonesia 2017*: Jakarta.
 _____ . 2017. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017*: Jakarta.
- Brodjonegoro, Bambang P.S.
<https://www.sumbar.antaraneews.com/berita/237116/bappenas-pulau-sumatera-penyumbang-ekonomi-terbesar-kedua-indonesia>. Diakses 25 September 2019.
- Cahyaningsih, Nur. 2015. *The Analysis of Factors Affecting Foreign Investment in Indonesia*. FosSEI Yogyakarta: Indonesia.
- Familioni, K.A. 2004. *The role of economic and social infrastructure in economic development: A global View*.
- Gujarati, Domar N. 2006. *Dasar – Dasar Ekonometrika*. Terjemahan Sumarno Zain. Erlangga: Jakarta.
- Haepf, Tobias dan Carl Lin. 2016. *How Does The Minimum Wage Affect Firm Investment In Fixed And Human Capital? Evidence From China*. Discussion paper series IZA DP No. 10332. Forschungsinstitut zur der Arbeit Institute for the Study of Labor.
- Hussain, Dr. Mumtaz Shah. 2019. *Telecommunication Infrastructure Development and FDI into Asian Developing Nations*. University of Peshawar: Pakistan.
- Jhingan, L. M. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Persada: Jakarta.
- Khadaroo, A. J. dan B. Seetanah. 2008. *Transport infrastructure and foreign direct investment*. University of Technology Mauritius: Mauritius.